"Globalisasi" Sebagai Masalah Bagi Pendidikan

Ahmad Syafii Maarif

Abstract:

Globalization is a word borderless, where nation-state interact each other without borders in allr aspects like economy, social, politics, militer etc. But globalization generate the rich country come richer and the poor coms poorer. Indonesia suffered the effects of globalization in multydimension crisises. To answer those problems, writer try to describe how the effect of globalization and suggest some solutions to answer globalization problems through developed education system.

Pendahuluan

Deng Xiaoping, pembaharu besar Cina abad ke-20, yang selalu menekankan bahwa orang harus menarik kesimpulan tentang kebenaran dari fakta, bukan dari harapan-harapan betapapun mulianya harapan itu.[1] Menghadapi gelombang globalisasi dalam kaitannya dengan pendidikan kita, pendapat Deng ini perlu kita jadikan salah satu acuan untuk melihat di mana posisi pendidikan kita yang sebenarnya. Isu globalisasi adalah ciptaan negara-negara kaya dan kuasa yang belum tentu didukung fakta, sedangkan negara berkembang lebih banyak dijadikan mangsa untuk dieksploitasi demi meraup keuntungan yang hampir tanpa batas. Dari segi ini, globalisasi tidak lain daripada perpanjangan tangan kolonialisme dan imperialisme Barat yang berlangsung sampai 1960-an, pada saat negara-negara di Asia dan Afrika bangkit melawannya. Perlawanan ini secara fisik dan militer relatif berhasil dengan korban yang tidak kecil, tetapi secara ekonomi mereka telah masuk ke dalam perangkap badan-badan keuangan dunia Barat, seperti IMF (*International Monetary Fund*), Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan sejenis itu. Pertanyaan yang menantang adalah: bagaimana semestinya paradigma pendidikan negara berkembang, khususnya Indonesia, untuk dapat keluar dari perangkap kekuatan global asing yang berkuasa. Di sini, kualitas manusia suatu bangsa akan sangat menentukan. Uraian berikut mencoba menjawab masalah ini dengan kepala dingin

[1] Lih. Mahathir Mohamad, *Globalisation and the New Realities*. Subang Jaya: Pelanduk Publications, 2002, hlm. 30.

sesuai dengan resep Deng di atas. Kita harus turut merumuskan kebijakan negara kita berdasarkan fakta di lapangan, baik pada tingkat nasional, regional, dan global.

Neo-Imperialisme, Sistem Negara Bangsa, dan Pendidikan Kita

Kalau menyebut Barat, dalam otak saya pada saat ini sesungguhnya yang terbayang adalah Amerika Serikat, yang saya katakan sebagai imperialisme keslangan. Amerika Serikat di sini adalah dalam arti *state power* (kekuasaan negara), bukan publik atau pendapat elit, untuk meminjam Noam Chomsky.[2] Tentu beberapa negara Eropa Barat, khususnya Inggris, juga telah menjadi pendukung setia politik luar negeri Amerika yang ekspansif ini. Gempuran terhadap Afghanistan dan Irak belum lama ini harus dilihat dari watak imperialisme kesiangan ini. Di bawah Presiden George Walker Bush, cetak biru sangat dirasakan dan dikutuk dunia, tetapi orang seperti tidak berdaya menghadapinya. Di sini berlaku formula "kekuatan adalah kebenaran". Hukum internasional dianggapnya sebagai angin lalu saja. Jadi, sangat primitif sesungguhnya. Ironisnya tidak sedikit pula di antara ekonom kita dan intelektual kita yang mengekor begitu saja terhadap dikte IMF yang dipayungi negara adidaya itu. Karena mereka tidak cukup terpelajar dalam membaca peta masyarakatnya sendiri di tengah-tengah peta politik dunia yang semakin liar saja. Adapun teori yang mengatakan bahwa dengan globalisasi, bentuk negara-negara akan semakin melemah ternyata tidak didukung oleh fakta. Justru sebaliknya yang terjadi, jumlah negara-bangsa semakin bertambah saja didorong oleh semangat etno-nasionalisme yang penuh euforia.

Mengapa Amerika dan para pendukungnya demikian bernafsu memaksakan kehendaknya untuk menjual gagasan globalisasi agar menjadi milik seluruh dunia? Saya kira pendekatan yang digunakannya bersifat pragmatis saja untuk tujuan-tujuan dagang. Dengan globalisasi, arus barang dan modal akan menjadi semakin lancar antar negara, dan ini sangat menguntungkan negara-negara kaya dan kuasa yang telah menguasai teknologi informasi yang serba canggih. Sebaliknya negara-negara berkembang yang tidak siap untuk bersaing dengan negara-negara maju pasti akan menuai bencana dan kerugian. Apalagi sejak satu setengah dasawarsa yang lalu, Amerika telah muncul sebagai negara adikuasa satu-satunya setelah Uni Soviet hancur berkeping-keping. Karena merasa sebagai pemenang tunggal, lalu dunia hendak dikangkanginya *semau gue*. Pengalaman pahit yang diderltanya di Vietnam

[2] Lih. Noam Chomsky, *Hegemony or Survival: America's Quest for Global Dominance*. Crows Nest NSW, Australia: Allen & Unwin, 2003, hlm. 4.

antara tahun 1954-1975 tidak membuat Amerika jera melakukan invasi dan intervensi atas negara lain yang berdaulat, demi pemuasan nafsu hegemoninya.

Kalau untuk membangun Eropa pasca PD (Perang Dunia) II misalnya, Amerika dengan *Marshall Plan*-nya dinilai sebagai pelindung, penyelamat, dan pemberi bantuan terhadap negara-negara yang hancur akibat perang, kemudian mengapa kemudian berubah menjadi neo-imperialis. Benarlah kritik Emmanuel Todd, pengarang Perancis, yang mengatakan bahwa Amerika semula dianggap sebagai kekuatan pelindung, telah berubah menjadi pemangsa (*predator*).[3] Amerika sebuah bangsa kaya, tetapi tidak mau mengembangkan sebuah budaya kearifan global untuk benar-benar membantu negara miskin yang tingkat ketergantungannya atas "belas-kasihan" negara kaya semakin tinggi. Telapi sering berlaku dalam praktik bahwa Amerika tanpa menggunakan standar moral yang umum tidak segan-segan membantu sebuah rejim yang otoritarian dan korup di dunia ketiga, asal yang bersangkutan bersedia didikte dan menyerahkan lehernya untuk Amerika.

Contoh yang dekat dengan kita adalah bangsa kita sendiri di bawah Orde Baru (orba) yang korup sering dipuji oleh badan-badan keuangan dunia, seperti IMF dan Bank Dunia. Karena telah membuka pintu lebar-lebar untuk menerima resep dan model pembangunan menurut cara mereka. Bukan saja mengikuti model mereka, pada waktu krisis moneter melanda kawasan Asia Timur pada 1990-an akhir, Indonesia adalah negara yang paling patuh kepada IMF. Malaysia justru membangkang, dan ternyata cepat pulih perekonomiannya. Mahathir Mohammad dengan bangga mengatakan : *"Since Malaysia is not under the IMF we are able to keep off the foreign predators"*.[4] Perbedaan sikap antara Indonesia dan Malaysia menghadapi IMF terlalu jauh. Bagi Indonesia IMF sebagai penyelamat (*saviors*), bagi Malaysia sebagai pemangsa (*predators*).

Fakta kemudian menunjukkan bahwa Malaysia berada pada jalur yang benar dan terhormat, sedangkan Indonesia menempuh jalan yang keliru dan memalukan. Mahathir bahkan mengatakan bahwa jika Malaysia tunduk kepada "perintah" IMF, maka, *"we would lose our independence and our honour"*.[5] Sebuah penegasan pemimpin yang percaya kepada diri sendiri. Pertanyaannya adalah: Apakah sistem pendidikan Indonesia dapat membentuk warga negara yang percaya kepada diri sendiri dan punya kepekaan yang tinggi terhadap kehormatan dan kedaulatan

[3] Lih. Emmanuel Todd, *After the Empire: The Breakdown of the American Order*, terj. C. Jon Delogu. London: Constable & Robinson, 2003, hlm. 191.
[4] Mahathir, *op.cit.*, hlm. 122.
[5] *Ibid.*, hlm. 120.

bangsa? Kalau saya menyebut Mahathir di sini bukan karena mendukung semua kebijakannya. Kezaliman yang dilakukannya terhadap Anwar Ibrahim adalah bagian kelemahan fatal kepemimpinan Mahathir.

Tidak hanya Mahathir yang curiga kepada IMF. Pada tahun 1997 Joseph Stiglitz, ekonom Amerika pemenang Hadiah Nobel Ekonomi 2001 telah mengingatkan IMF agar tidak ceroboh dalam menangani krisis di Asia Timur, tetapi tidak dihiraukan. Kecerobohan ini yang kemudian memicu kekacauan sosial politik di kawasan itu dengan ongkos yang sangat tinggi, baik harta maupun nyawa. Indonesia adalah yang terparah karena keseliaannya kepada IMF hampir tanpa batas. Bahkan direktur pelaksana IMF Michel Camdessus, kata Stiglitz, tenang-tenang saja,[6] seperti tidak akan terjadi apa-apa. Mungkin karena tuan direktur ini masih rabun ayam dalam membaca peta krisis di Asia Timur yang sangat menggoncangkan itu. Indonesia sebagai negara besar keempat di dunia masih tertatih-tatih akibat gempuran krisis itu. Sementara negara-negara lain yang juga sudah hampir pulih, karena para pemimpinnya cukup peka dalam membaca peta. Sekalipun sebagian mereka korup, tingkat korupsi mereka masih jauh di bawah Indonesia yang sudah sangat menggurita sampai hari ini.

Dalam suasana krisi keuangan yang menyesakkan nafas itu, kaum spekulan valas malah mengambil peluang untuk menangguk di air keruh. Stiglitz membeberkan sebuah kasus tentang spekulasi ini di Thailand sebagai berikut :

> ...seorang spekulan pergi ke sebuah bank Thailand, meminjam 24 miliar Baht yang pada kurs awalnya dapat dikonversi menjadi $1miliar. Seminggu kemudian nilai kurs jatuh. Yang dulunya 24 baht per satu dolar, sekarang menjadi 40 baht per satu dolar. Ia mengambil $600 miliar baht untuk membayar pinjamannya. Sisa $400 juta adalah keuntungannya—penghasilan yang sangat besar untuk kerja selama satu minggu, dan investasi yang hanya menggunakan sedikit uangnya.[7]

Di Indonesia tentunya hal serupa juga terjadi pada saat-saat rupiah sedang terjun diterpa krisis. Sekalipun keuntungan yang diperoleh mungkin tidak sebesar yang diraup spekulan pada bank Thailand di atas. Di mana pun di muka bumi ini, para

[6] Baca Josep E. Stiglitz, *Globalisasi dan Kegagalan Lembaga-Lembaga Keuangan Internasional*, terj. Ahmad Lukman. Jakarta : Inapuplikatama, 2003, hlm. 166-167. Sepanjang 60 halaman (125-185) Stiglitz menguraikan krisis Asia Timur ini sambil memberikan kritik tajam kepada IMF yang ternyata bukan bagian dari solusi, tetapi malah bagian dari masalah.
[7] *Ibid.*, hlm. 133.

spekulan selalu memanfaatkan situasi krisis bila situasi itu dinilai menguntungkan mereka. Sedikit sekali yang bersedia berpikir panjang tentang akibat dari spekulasi mereka itu. Dalilnya adalah: aku untung. Perkara negara atau orang lain menderita, tidak perlu dipertimbangkan benar. Sikap a-moral semacam ini dapat ditemui di setiap negara, termasuk di kalangan mereka yang mengaku beragama.

Sekarang mari kita tilik masalah pendidikan kita. Begitu jauh sistem pendidikan di dunia berkembang tidak diarahkan kepada proses penguatan kedaulatannya dalam politik, ekonomi dan kultur, tetapi malah dalam kenyataannya menjadi semakin menggantungkan nasibnya pada negara lain. Dalam perspektif ini, tanpa mengubah paradigma menjadi sistem pendidikan yang memerdekakan warga, dunia ketiga akan tetap menjadi budak negara kaya di bawah payung kapitalismenya yang menghisap. Sistem perdagangan bebas yang selalu dihembuskan negara kaya adalah bagian dari nafsu kapitalisme yang ingin senantiasa mendominasi dunia berkembang. Sistem ini agar terkesan lebih sopan lalu diberi nama baru : *Globalization, a world borders* (Globalisasi, sebuah dunia tanpa batas)[5] yang telah semakin memiskinkan negara miskin. Sementara sebagian elitnya yang tidak punya hati nurani malah hidup dalam kemewahan yang melimpah. Suasana yang serba kontras ini telah menyulut berbagai bentrokan sosial yang berdarah-darah. Indonesia termasuk yang terparah dan paling berpengalaman dalam membunuh teman sesama anak bangsa. Untuk semakin menguatkan keterlibatan emosi dalam konflik sosial ini, tidak jarang mereka telah membajak nama Tuhan untuk menikam dan menembak teman sendiri, tanpa rasa dosa.

Bom bunuh diri adalah salah satu bentuk yang ekstrem, tetapi masih terkait dengan masalah kesenjangan sosio-ekonomi ini, sekalipun faktor politik juga sangat penting. Bom ini sudah beberapa kali meledak di beberapa tempat di Indonesia dan telah membunuh ratusan manusia. Masalah ini harus dibaca dalam kerangka jurang kemiskinan dan ketidakadilan yang masih menganga lebar tidak saja di negeri kita, tetapi juga di beberapa negara Muslim di permukaan bumi. Kezaliman Israel di Palestina merupakan salah satu pemicu abadi bagi bom bunuh diri. Ada sebuah misteri yang harus diungkapkan dalam membaca perbuatan nekad ini. Mereka bunuh diri sambil membunuh orang lain, sesungguhnya didorong sebuah perasaan putus asa yang tersembunyi jauh di peta bumi psikologis mereka yang terdalam. Mereka sampai kepada kesimpulan yang tidak terkatakan bahwa dunia ini sudah tidak layak bagi hunian manusia. Gelombang modernitas yang kejam dan keji di bawah

[5] Mahathir, *op.cit.*, hlm. 22.

bayang-bayang kapitalisme modern telah memaksa mereka untuk berdalil: "Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah." Di seberang makam menurut halusinasi mereka barisan bidadari yang serba cantik sedang menanti kedatangan para pengebom yang putus asa ini. Ini adalah formula sebuah teologi kalah yang sangat menyesatkan, yang dianut oleh segelintir pemuda muslim di berbagai belahan dunia. Doktrin mereka yang menganggap enteng kematian sebenarnya berangkat dari suasana batin yang sudah pasrah, tidak berani hidup, karena tidak punya sesuatu yang berharga untuk ditawarkan kepada kemanusiaan. Atau singkatnya, ini adalah teologi kematian, bukan teologi kehidupan yang siap membangun peradaban yang ramah dan adil sebagai alternatif dari peradaban sekuler, jika bukan peradaban ateistik. Sungguh sangat menyedihkan.

Masih terkait dengan masalah pendidikan. Karena sebagian besar kaum elit terpelajar di negara miskin telah mengalami pencucian otak melalui sistem pendidikan Barat, maka dampak sosialnya memang sangat jauh dan buruk. Mereka kehilangan kepekaan terhadap penderitaan yang ditanggungkan oleh sebagian besar rakyatnya sendiri. Tentu kita tidak boleh membuat generalisasi di sini, sebab tidak kurang pula jumlah kaum terdidik alumni universitas Barat yang tetap kritikal terhadap kapitalisme. Karena akal sehat dan nurani mereka yang masih lumpuh. Mereka belajar banyak dari Barat untuk kepentingan bangsa secara keseluruhan, bukan untuk memperalat bangsa bagi kepentingan pribadi dan bos Baratnya. Dari kelompok inilah sebenarnya orang mengharapkan adanya terobosan untuk tidak terus membebek ke Barat. Bahwa banyak unsur positif peradaban Barat yang perlu ditiru dan diambilalih adalah juga sebuah fakta keras yang harus diterima. Di sinilah pentingnya sebuah bangsa perlu memiliki saringan kultural yang kuat untuk menepis virus destruktif dari peradaban lain.

Garda depan untuk menangkal dan menapis pengaruh buruk ini terletak pada pembenahan paradigma dan sistem pendidikan yang dapat melahirkan manusia-manusia merdeka yang bebas dari mentalitas budak. Sebagai bekas anak jajahan, cukup sulit bagi orang Indonesia untuk berkata: "Inilah aku yang sejajar dengan anda, sekalipun aku menimba ilmu di negeri anda". Perasaan sederajat ini menjadi sangat penting untuk diturnbuhkan dalam lingkungan kampus kita, agar pada saatnya perasaan rendah diri terhadap asing terkikis habis. Pada forum ini saya menganjurkan dengan sangat agar Universitas Andalas melakukan kajian yang benar-benar mendalam dan objektif tentang plus minus peradaban modern, di dalamnya masalah globalisasi harus mendapat prioritas utama. Dari hasil kajian ini,

kita kemudian merumuskan strategi pendidikan masa depan yang benar-benar berdasarkan data dan fakta konkret di lapangan.

Sekiranya para akademisi di Ranah Minang ini mau mempertimbangkan gagasan ini secara serius, maka Universitas Andalas akan tampil sebagai kampus pertama di nusantara yang memelopori kajian mendalam tentang bagaimana menghadapi kekuatan gelombang modernitas yang tidak manusiawi, dan globalisasi adalah bagian menyatu dengan kekuatan itu. Filosofi sosial Minang yang punya nilai universal berbunyi: "Alam takambang jadi guru". Seorang Minang, menurut filosofi ini, di samping tetap setia kepada nilai-nilai keminangannya dan sebagai warga negara Indonesia, ia adalah seorang patriot sejati. Selain itu, wawasan mondial sebagai warga dunia jangan sampai dilupakannya. Filosofi ini perlu didalami lagi agar otak dan hati kita tidak pernah berhenti "berdansa" mencari kearifan demi kearifan yang tersembunyi dalam rahim berbagai unit peradaban yang pernah dikenal manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Dengan filosofi ini, si Minang tidak boleh gamang memasukkan diri ke dalam kekuatan arus peradaban global dengan tetap bertahan pada autentisitas kepribadiannya. Sebuah pergumulan panjang yang memerlukan stamina spiritual prima.

Di era global, sebuah suku atau bangsa memang tidak mungkin lagi mengurung dirinya dalam lingkaran dinding negara bangsa. Ini adalah sebuah fakta yang tidak dapat dibantah. Yang dituntut dari bangsa ini adalah kemampuannya yang tinggi untuk mengubah tantangan global menjadi peluang global, untuk diabdikan kepada penegakan keadilan dan penciptaan kemakmuran rakyat secara merata. Tetapi, jika paradigma pendidikan yang selama ini tidak mencerahkan warga suatu negara tetap saja dipertahankan, maka resikonya adalah bahwa negara itu tidak akan pernah memiliki kedaulatan yang sesungguhnya. Sepintas pandang negara itu kelihatan merdeka dan berdaulat, tetapi secara *de facto* negara itu tidak lebih dari sebuah satelit negara asing. Keadaan akan menjadi semakin runyam lagi bila kaum elit di negara satelit ini merangkap pula menjadi koruptor kelas hiu di atas penderitaan rakyatnya yang tak kunjung usai.

Dalam pergaulan selama bertahun-tahun dengan tokoh-tokoh lintas agama, lintas kultural, lintas etnis, politisi, jenderal, birokrat, penulis mendapat kesan yang menggelisahkan. Hanya sebagian dari mereka yang punya wawasan jauh ke depan untuk membela Indonesia agar tetap utuh, dan kedaulatannya benar-benar dihargai dan dihormati bangsa-bangsa lain di dunia. Umumnya orang telah tenggelam dalam kesibukan harian sambil memanfaatkan peluang yang ada untuk menggerogoti kekayaan bangsa yang sudah terkuras sedemikian jauh ini. Itulah sebabnya di

kalangan forum dalam beberapa tahun terakhir ini saya sering mengungkapkan bahwa secara moral kerusakan bangsa ini telah hampir sempurna. Kampus, pesantren, organisasi-organisasi sosial keagamaan seperti telah kehabisan daya dan tenaga untuk membendung arus kerusakan ini. Partai politik jangan dilanya lagi. Mereka pada umumnya adalah petualang-petualang politik yang memakai slogan demokrasi sebagai mata pencarian.

Pembangunan model kapitalisme, menurut sosiolog Tunisia Dhaouadi, telah menciptakan terlalu banyak kerusakan: masalah lingkungan yang semakin memburuknya ketidakadilan sosial-ekonomi di antara berbagai kelompok dalam masyarakat yang sama, dan jurang kepincangan yang semakin menganga antar bangsa-bangsa. Rekaman kinerja kapitalisme modern di dunia berkembang menunjukkan bahwa sistem ini tidak saja telah menghisap dan memelaratkan bangsa-bangsa lain secara ekonomi, tetapi juga telah memiskinkan kebudayaan mereka dan merusak fondasi psikologis rasa harga diri mereka.[9] Dhaouadi menambahkan bahwa ada korelasi yang kuat antara fenomena kontemporer Negara Terbelakang Bentuk Lain (*psycho-cultural underdevelopment*) di dunia ketiga dan dominasi kekuatan-kekuatan dahsyat kapitalis Barat yang berlangsung sejak Revolusi Industri."[10] Dengan demikian akar sejarah kepincangan dan ketidakadilan ini telah berusia panjang, jauh sebelum dunia ketiga memperoleh kemerdekaannya kembali.

Kearifan Global dan Usainya Globalisasi

Mengenai kearifan global ini pernah penulis sampaikan langsung kepada Presiden George W. Bush di Bali pada 22 Oktober 2003, secara lisan dan tertulis untuk menunjukkan bahwa politik luar negeri Amerika yang imperialistis hanya akan membawa bencana bagi dunia. Kekuatan dolar dan militer yang dimilikinya penulis minta digunakan untuk mengembangkan sebuah kultur kearifan global yang diharapkan oleh seluruh penduduk bumi. Pesan ini penulis sampaikan karena, Amerika di bawah Bush semakin menampakkan arogansinya untuk mendikte dunia ini agar tetap takluk di bawah pengaruhnya. Padahal teori *unipolar* yang diharapkan Amerika setelah kejatuhan komunisme tidak didukung oleh kenyataan empirik. Munculnya Uni Eropa pada suatu saat nanti akan semakin mengimbangi kekuatan Amerika untuk menguasai dunia. Perbedaan sikap yang tajam yang ditunjukkan Perancis dan Jerman menghadapi invasi terhadap Irak adalah sebuah indikasi bahwa

[9] Lih. Mahmoud Dhaouadi, *Globalization of the Underdevelopment : Third World Cultural Identities*. Kuala Lumpur : A.S. Noordeen, 2002, hlm. XVI.
[10] *Ibid.*,

dikte Amerika tidak selalu mempan dan efektif. Rasa utang budi Eropa terhadap Amerika memang belum hilang, berkat *Marshall Plan*-nya yang berhasil menolong Eropa dari kehancuran akibat perang malawan Hitler dengan nazinya yang ambisius itu. Tetapi petualangan politik luar negeri Amerika yang ekspansif sejak seperempat abad terakhir telah dikecam mereka sebagai suatu yang kuno dan tidak bermoral.

Kiranya menjadi penting dikemukakan hasil penelitian Alan Rugman, guru besar pada beberapa universitas terkemuka serta konsultan bisnis di Eropa dan Amerika, yang berkesimpulan bahwa globalisasi adalah sebuah mitos.[11] Tidak pernah terjadi dalam realitas hubungan bisnis antar negara. Dengan mantap disimpulkannya: *"We have reached the end of globalization."*[12] Sebagai contoh diberikannya data tentang bisnis mobil. Ternyata tidak pernah ada yang disebut mobil global itu, sebab di atas angka 90% mobil itu diproduksi dan dijual di wilayah yang sama. Begitu juga untuk jenis produksi yang lain seperti kimia, sebagian besar diproduksi dan dijual di kawasan yang sama.[13]

Memang Francis Fukuyama dalam bukunya *The End of History* terlalu menilai tinggi demokrasi liberal sebagai *"the best possible solution to the human problem."*[14] Namun, fakta di lapangan telah menyangkal hipotesis semacam ini. Sistem demokrasi saja misalnya tidak ada yang bercorak global, pasti ada perbedaan-perbedaan mendasar dalam teori dan pelaksanaannya, sekalipun sebagian besar negara di dunia menyatakan sebagai penganut demokrasi.[15] Lebih parah lagi adalah fakta bahwa Amerika Serikat di bawah Bush terutama telah menggunakan demokrasi untuk menjarah bangsa lain. Apakah demokrasi *ala* Bush adalah *"the best solution to the human problem?"*

Penutup

Jika gagasan globalisasi adalah sebuah mitos, maka kita tidak perlu terlalu pusing memikirkannya. Akan jauh lebih bermanfaat jika energi bangsa ini dikerahkan untuk memperkuat pilar-pilar budaya domestik yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan menurut visi dan versi Indonesia untuk melahirkan manusia merdeka yang berlanggung jawab dan percaya diri. Membangun sistem demokrasi

[11] Lih. Alan Rugman, *The End of Globalization*. London : Random Hoyse, 2000, hlm. 1.
[12] *Ibid.*, hlm. 219.
[13] *Ibid.*, 12-13.
[14] Lih. Francis Fukuyama, *The End of History and the Last Man*. New York : Avon Books, 1992, hlm. 338.
[15] *Ibid.*, hlm. 49-50.

yang sehat dengan dukungan para demokrat yang bermoral dan menciptakan sistem ekonomi bangsa yang berkeadilan, bukan yang eksploitatif seperti tampak dalam sistem kapitalisme. Untuk mendekati cita-cita mulia ini, maka peran perguruan tinggi bukan saja strategis, tetapi menjadi sangat mutlak. Oleh sebab itu perguruan tinggi harus bekerja keras untuk merumuskan jawaban yang tepat untuk menghadapi setiap tantangan yang datang silih berganti sejalan dengan bergulirnya waktu yang selalu membawa perubahan yang kadang-kadang muncul secara mendadak.